

KEBIJAKAN REDAKSIONAL HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR DALAM PENYIARAN BERITA KRIMINAL DI KOTA MAKASSAR

Editorial Policy of Daily Berita Kota Makassar in Reporting Criminal News in Makassar City

Irwan,¹

Andi Alimuddin Unde,² Hasrullah²

¹Harian Berita Kota Makassar

²Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin

Email: lupus_irwan@yahoo.com

Abstrak

Berita kriminal adalah berita yang memuat informasi tentang kriminalitas, yang berarti informasi mengenai penyimpangan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar selama lebih dari tiga bulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari hasil metode wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi partisipatif moderat, *focus group discussion* (FGD), wawancara, kuisiner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas agenda media, agenda publik dan kesesuaian antara agenda media dan agenda publik terhadap kebijakan redaksional harian Berita Kota Makassar dalam penyiaran berita kriminal belum optimal. Pemimpin redaksi selaku pengendali redaksi ternyata kewenangannya dalam menentukan agenda media dan agenda publik juga sangat terbatas. Pemred baru akan mengambil kebijakan jika ada peristiwa yang sangat besar dan penting seperti kejadian dan waktunya paling dekat atau paling luas cakupannya itupun tetap harus melakukan koordinasi dengan Korlip dan para redaktur. Redaktur adalah penentu kebijakan ketika berita sudah masuk ke meja editor. Redaktur memiliki hak veto secara penuh dalam menerbitkan sebuah berita atau dibatalkan.

Kata Kunci: Kebijakan Redaksional, Penyiaran, Berita Kriminal

Abstract

This study aims to analyze the media agenda Daily News Makassar in broadcasting crime news, identifies the public agenda and editorial policy of Makassar in the Daily News crime news broadcasting and measure the degree of correspondence between the media agenda and the public agenda Daily News Editorial Policy Makassar in broadcasting crime news in Makassar. The research was conducted at the Daily News Newspapers in Makassar for more than three months using a qualitative descriptive method of research procedures which produce descriptive data from the analytical results of the interview method. Data collection techniques are moderate participant observation, focus group discussion (FGD), interviews, and documentation kuisiner. The results showed that the effectiveness of the media agenda, the public agenda and kesesuaian between the media agenda and the public agenda of the Daily News editorial policy of Makassar in broadcasting crime news is not optimal. As the chief editor of the editorial control turns its authority in determining the media agenda and the public agenda is also very limited. New Editor in Chief will take the policy if there is a very large event and important as the incidence of and time to closest or the most wide-ranging and even then still have to coordinate with Korlip and editors. Editors are decision makers when the news has been entered into the table editor. Editor has full veto power in issuing a news or canceled.

Keywords: Editorial Policy, Broadcasting, Crime News

PENDAHULUAN

Berita kriminal adalah berita yang memuat informasi tentang kriminalitas, yang berarti informasi mengenai penyimpangan hukum dalam masyarakat. Pengertian tersebut didasarkan pada pendapat yang menerangkan bahwa kriminal adalah perbuatan jahat yang dapat dijatuhi hukuman menurut Undang-undang dan merupakan tindakan pidana bukan perbuatan perdata (Salim, 1991). Sedangkan kriminalitas merupakan hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana dan merupakan kejahatan. Pengertian tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang hukum.

Dari pandangan sosiologis, kriminal merupakan “*a violation of criminal law for which some governmental authority applies formal penalties*” (Schaefer, 2001). Schaefer menjelaskan yang disebut kriminal adalah sebuah penyimpangan yang dilakukan seseorang terhadap aturan sosial yang dibuat oleh negara. Istilah kriminalitas erat kaitannya dengan penyimpangan atau deviansi. Dalam kajian sosiologis, orang yang melakukan tindakan kriminal berarti dirinya adalah orang yang melakukan tindakan kriminal.

Jenis kriminalitas sangat bervariasi. Banyak ahli sosiologi-kriminal masyarakat yang mencoba memilah jenis-jenis kriminal, di antaranya: *professional crime, organized crime, white collar* dan *technology-based crime* dan *victimless crime* (Schaefer, 2001). Chibnall (dalam Boyle, 2005) mengidentifikasi ada 8 nilai berita kriminal. Ini merupakan investigasinya dalam jurnalisme kriminal di Inggris.

Delapan nilai berita tersebut adalah: *immediacy (speed, currency), dramatization (drama, action), structured access (experts, authority), novelty (angle, speculation, twist), titillation (revealing the forbidden, voyeurism), conventionalism (dominant ideology),*

personalization (culture of personality, celebrity), simplification (elimination of shades of grey).

Berita kriminal (Riksono, 2008) adalah uraian tentang peristiwa atau fakta, atau pendapat yang mengandung nilai berita tentang kejahatan yang disajikan di media massa. Berita kriminal sebagai cara dalam menyampaikan informasi hanya berkisar mengenai kejadian kriminal atau kejahatan, kecelakaan, kebakaran dan atau orang hilang, berita ini dapat dikemas dalam format berita (*news*) ataupun laporan mendalam (*indepth report*) yang mengupas suatu kasus lama atau baru yang belum, sudah terungkap, dan terkadang disertai tips-tips untuk mengantisipasi setiap modus kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agenda media Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar dalam penyiaran berita kriminal, mengidentifikasi agenda publik dan kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar dalam penyiaran berita kriminal dan mengukur derajat kesesuaian antara agenda media dengan agenda publik dan Kebijakan Redaksional Harian Berita Kota Makassar dalam penyiaran berita kriminal di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara.

Populasi adalah sebanyak 110 orang dari seluruh jumlah karyawan yang terdiri dari 5 bagian yakni bagian redaksi, iklan, sirkulasi, umum dan bagian keuangan, namun jumlah responden yang ditentukan untuk penelitian ini sebanyak 60 responden.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan unit analisis pada Harian Berita Kota Makassar Edisi Tahun 2003–2004, 2007-2008

dan 2011-2012 pada halaman utama, hukum dan halaman kriminal, akan mengkaji tentang dasar-dasar atas kebijakan redaksional media lokal di Makassar atas pilihan redaksi dalam menyajikan informasi kriminal sebagai variabel tergantung (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variables*) antara lain variabel struktur organisasi, kerjasama dengan instansi lain, kemampuan administratif karyawan dan perencanaan program kerja redaksi.

Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan dengan menggunakan kuesioner. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa atau diteliti dalam penelitian ini setelah menyelidiki sebagian dari unsur-unsur tersebut sesuai dengan sampel penelitian yang ditetapkan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Agenda media adalah daftar berita-berita dan peristiwa-peristiwa pada suatu waktu yang disusun berdasarkan urutan kepentingannya.

Agenda media terdiri dari pokok persoalan, peristiwa, anggapan, dan pandangan yang memanfaatkan waktu dan ruang dalam publikasi yang tersedia untuk disampaikan kepada publik, (Manhein dalam Descartes, 2004).

Pendekatan dasar teknik ini adalah: (1) Memilih contoh atau keseluruhan isi, (2) Menetapkan kerangka kategori acuan eksternal yang relevan dengan tujuan pengkajian, (3) Memilih satuan analisis isi, (4) Menyesuaikan isi dengan kerangka kategori, per satuan unit yang terpilih, (5) Mengungkapkan hasil sebagai hasil distribusi menyeluruh dari semua satuan atau per contoh, dalam hubungan dengan frekuensi hal-hal yang menjadi kerangka acuan (Krippendorff, 1991)

Sebelum dipublikasikan menjadi sebuah berita, informasi harus melewati berbagai tahapan seleksi terlebih dahulu. Pada akhirnya, ada informasi yang lolos dari tahap seleksi kemudian diangkat menjadi berita, dan ada informasi yang tidak lolos tahap seleksi. Hal ini dikarenakan tidak tersedia cukup waktu dan tempat di dalam media massa (Arsan, 2013). Fungsi pengaturan tempat dan waktu ini berkaitan dengan fungsi redaksi sebagai penjaga gawang informasi (*gatekeeper* yang menepis berita-berita masuk (Syakir, 2013). Media melalui kegiatan yang disebut *gatekeeping* mengontrol akses khalayak terhadap berita, informasi, dan hiburan (Arsan, 2013).

Agenda Publik

Agenda Publik, yaitu media agenda dengan cara tertentu akan memengaruhi dan berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik maka interaksi akan menghasilkan agenda publik dan mengarah pada agenda kebijakan. Agenda kebijakan juga dapat dimaknai sebagai agenda publik untuk berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh penentu kebijakan yakni pemerintah dan interaksi tersebut akan

menghasilkan agenda kebijakan

Agenda Publik juga berarti *familiarity* (keakraban), derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. *Personal salience* (penonjolan pribadi), relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi; *Favorability* (**kesenangan**), **pertimbangan senang atau tidak senang** akan topik berita. *Agenda Kebijakan: Support* (dukungan), kegiatan menyenangkan bagi posisi berita tertentu; *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan), kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan; *Freedom of action* (kebebasan bertindak), nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.

Kesesuaian Antara Agenda Media dan Agenda Publik

Kesesuaian antara agenda media dan agenda publik tampak terlihat jelas dari hasil penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa kesesuaian kedua agenda tersebut tidak berjalan karena kebijakan redaksional dalam seleksi pemberitaan berita kriminal pada redaksi BKM juga tidak efektif karena adanya faktor interfensi baik dari internal perusahaan maupun pihak eksternal.

Kebijakan redaksional merupakan jantung dari proses yang dilakukan dalam memproduksi isi surat kabar maupun media elektronik televisi, suatu kontrol internal yang berlaku di dalamnya. Kebijakan redaksional ini memengaruhi dan mengontrol isi yang akan diterbitkan pada halaman yang disediakan dalam menjalankan fungsinya kepada masyarakat.

Suatu berita yang diterbitkan, dipilih melalui proses perencanaan dan bahkan hasil kajian yang cukup panjang. Setiap media khususnya media surat kabar BKM dalam pemberitaan biasanya memiliki pedoman atau panduan masing-masing dalam penetapan beritanya, hal ini biasa disebut dengan kebijakan redaksional.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan agenda media, agenda publik dan kesesuaian antara agenda media dan agenda publik tidak berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena adanya interfensi baik dari internal perusahaan maupun eksternal hingga memengaruhi kinerja redaksi dalam melakukan perencanaan dan *budgeting* pemberitaan setiap hari. Akibatnya berita-berita kriminal yang menjadi perhatian publik dan layak jual terpaksa batal diterbitkan. Kinerja redaksi menjadi tidak berjalan sesuai dengan program, perencanaan juga menjadi lemah.

Isu yang paling penting untuk didiskusikan adalah terkait dengan adanya kasus yang menjadi perhatian publik tapi akhirnya tidak bisa diterbitkan di koran. Agenda media tidak bisa berjalan sesuai dengan agenda redaksi karena banyaknya yang berkepentingan dari berita tersebut. Sumber berita yang terlibat di dalam kasus tersebut menolak diberitakan. Dalam analisis *agenda setting*, faktor interfensi terbukti membuat agenda media dan agenda publik menjadi lumpuh.

Kondisi ini berasal dari stimulus efek komunikasi yaitu penyajian media, dan dapat bersumber dari khalayak (Winter dalam Descartes, 2004). Sifat-sifat stimulus menunjukkan karakteristik isu, yaitu: (1) Jarak isu, yaitu apakah isu itu langsung atau tidak langsung dialami individu, (2) Lama terpaan, yaitu apakah isu tersebut baru muncul atau mulai pudar, (3) Kedekatan geografis, yaitu apakah isu itu bertingkat lokal atau nasional, dan (4) Sumber, yaitu apakah disajikan oleh media yang kredibel ataukah media yang tidak kredibel.

Berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Prinsip ini berlaku bagi berita yang sifatnya diduga. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Proses pencarian dan penciptaan berita itu dimulai di ruang redaksi melalui forum rapat proyeksi. Istilah lain dari

rapat proyeksi adalah rapat perencanaan berita, rapat peliputan, atau rapat rutin reporter di bawah kordinator liputan (*Korlip*).

Proses peliputan hingga penyeleksian berita pada berita kriminal harus melalui beberapa tahapan internal sesuai dengan kebijakan redaksinya. Berita yang diangkat tidak sembarangan dipilih tetapi ditentukan setelah melewati berbagai macam pertimbangan oleh beberapa anggota redaksi seperti pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur, hingga reporter senior. Karena berita kriminal merupakan program *news* unggulan di BKM, jadi seluruh anggota redaksi tidak asal mengangkat suatu berita tanpa melihat nilai dan kualitas berita tersebut mulai dari *hard news* hingga *soft news*.

Nilai-nilai berita itu tidak lebih dari pada asumsi-asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang mendapat perhatian mereka, sehingga sebagian dari mereka menikmati informasi yang ada pada program pemberitaan tersebut.

Teori *gatekeeper* yang mengasumsikan bahwa berita sebelum terbit harus melalui penjaga gawang, gawang yang dimaksud adalah gawang dari sebuah media massa seperti Redaktur Pelaksana, Korlip dan Pemimpin Redaksi. Sedangkan arus berita internal dua tahap mengasumsikan sebagai revisi dari teori *gatekeeper*, di sini dijelaskan bahwa pemberitaan yaitu pengumpulan bahan berita dan pengolahan berita. Dari kedua teori ini, teori arus berita internal dua tahap Bass adalah yang paling sesuai dengan alur berita yang dilakukan di BKM.

Tindakan *gatekeeping* dalam proses peliputan berita kriminal sudah terlihat dari awal pemilihan isu yang terjadi di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Koresponden yang dipimpin oleh koordinator daerah yang bertugas meliput langsung tentunya menyeleksi berita apa saja yang layak diberitakan, sedangkan

reporter yang berada di dalam wilayah Makassar dan dipimpin oleh koordinator liputan sebelum memilih isu melakukan riset terlebih dahulu kemudian barulah akan dihasilkan kira-kira berita kriminal seperti apa yang akan diangkat.

Hasil dari pengamatan dan wawancara peneliti pada tanggal 14 April-20 Mei 2013, Redaktur Kriminal dan Hukum yang bernama Hamsa Samal berperan menjadi *gatekeeper* pertama. Selain itu Pemred juga bisa menjadi *gatekeeper* pertama tetapi jika ada peristiwa besar dan penting saja, selebihnya redaktur yang berwenang yang menjadi *gatekeeper* utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa ternyata kebijakan seorang pemimpin redaksi dalam susunan anggota redaksionalnya tidak selamanya digunakan. Kebijakan Pemred tidak selalu dibutuhkan sebab yang berwenang langsung terhadap peliputan hingga penyeleksian berita kriminal itu menjadi wewenang redaktur.

Terkecuali jika sewaktu-waktu ada kejadian atau peristiwa yang besar dan luas cakupannya baru seorang pemred akan mengambil kebijakan atas kejadian yang terjadi. Jadi jika tidak ada peristiwa besar, maka kebijakan ada di tangan redaktur dan pemimpin redaksi yang sifatnya hanya memantau dan membantu redaktur.

Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan berita *hard news* hingga *soft news* pada berita kriminal melalui tahapan seperti yang tercantum pada teori *gatekeeper* dan teori arus berita internal dua tahap Bass.

Atas dasar itu dari hasil penelitian ditemukan bahwa agenda media dan agenda publik Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar tidak berjalan dengan baik. Adanya intervensi dari komisaris dan direksi terhadap kebijakan redaksional Harian Berita Kota Makassar membuat proses pemberitaan terhadap informasi kriminal menjadi tumpul.

Pada kasus dugaan ijazah palsu yang dilakukan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo misalnya. Data dan informasi yang didapatkan reporter di lapangan sudah cukup jelas untuk mendudukan kasus ini pada tataran yang sebenarnya. Tapi saat kasus dugaan ijazah palsu ini diungkap tiba-tiba oleh Pemkab Gowa melakukan intimidasi terhadap koresponden Berita Kota Makassar di Gowa, menghentikan koran langganan yang masuk ke Pemkab Gowa dan memutuskan untuk tidak memasang iklan di Berita Kota Makassar jika pemberitaan kasus ini tidak dihentikan.

Bahkan sampai pada proses pra peradilan yang dilakukan warga Gowa terhadap penyidik di Polda Sulsel karena meng-SP3-kan kasus ini, proses pemberitaannya juga tidak lepas dari intervensi oleh Direksi.

Hal sama juga terjadi pada kasus penganiayaan yang dilakukan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru kepada enam orang warganya yang juga merupakan pendukung salah satu kandidat Gubernur Sulsel. Awalnya, pemberitaan kasus ini berjalan dengan baik. Tapi saat penyidik Polres Wajo menemukan fakta keterlibatan Bupati, secara mengejutkan koresponden Berita Kota Makassar di Kabupaten Wajo meminta kepada Direktur dan Pemred untuk menghentikan pemberitaan terhadap kasus ini atas permintaan Pemkab dengan alasan jika tetap diberitakan bisa mengganggu stabilitas keamanan Pilgub di Kabupaten Wajo.

Kasus ini sedang dalam proses pelimpahan berkas dari penyidik Direktorat Kriminal Umum (Diskrimum) Polda Sulsel ke tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Begitu derasnya respon publik atas kasus ini, proses penanganannya kemudian diambil alih oleh Polda Sulsel. Di Polda Sulsel, Bupati Wajo kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Selama proses pemeriksaan, yang biasanya wartawan diperbolehkan meliput dan

mengambil gambar tiba-tiba dilarang dengan tanpa alasan yang jelas dari penyidik.

Informasi yang diperoleh dari penyidik dan Kabid Humas Polda Sulsel setelah pemeriksaan juga tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya terjadi. Hingga kemudian, kasus penganiayaan ini sempat diungkap di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK Mahfud MD meminta agar Bupati dihadirkan tapi hingga persidangan selesai sang Bupati juga gagal didatangkan ke sidang MK.

Untuk kasus pembunuhan akuntan Bank Indonesia dan perampokan Bank Mandiri Cabang Sengkang juga terjadi intervensi. Hanya saja intervensi yang dilakukan melalui direksi berhasil dimentahkan di meja redaksi dengan pertimbangan bahwa kasus yang telah menelan korban jiwa sangat tidak manusiawi untuk dipetieskan. Redaksi tetap memberitakan peristiwa ini hingga kasusnya bergulir di pengadilan.

Sedangkan kasus pencurian Fasilitas Umum (Fasum) Lapangan Karebosi, intervensi terhadap kasus ini cukup tinggi. Faktanya, intervensi tak hanya dilakukan oleh direksi terhadap kebijakan redaksional BKM tapi juga dilakukan oleh komisaris. Mereka rela turun gunung hanya sekedar mengawal peristiwa ini agar tidak lolos ke meja redaksi (Arsan, 2013).

KESIMPULAN

Kami menyimpulkan bahwa agenda media tentang kebijakan redaksional dalam menyiarkan berita kriminal di Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar telah berjalan dengan baik.

Hanya saja peneliti menemukan bahwa secara substantif agenda media hanya berjalan pada tataran konsep tapi dalam praktiknya di lapangan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan di meja redaksi. Penyebabnya adalah karena adanya intervensi dari sejumlah

pihak seperti komisar, direksi, redaktur dan objek pemberitaan. Kondisi ini membuat para reporter dilematis dalam mengambil keputusan terutama saat menerima penugasan dari koordinator liputan dan koordinator daerah.

Begitu pula dengan agenda publik telah berjalan meski dalam realitasnya tidak sesuai perencanaan awal. Dalam sehari berita kriminal yang diproduksi hanya sekitar 70 persen yang bisa diterbitkan. Sisanya ada yang dibatalkan dan ada yang ditarik ke halaman dalam dengan *space* yang sangat kecil dan penjudulan yang terkesan dipaksakan.

Hal ini terjadi karena adanya interfensi dari direksi dan juga pihak-pihak tertentu yang sangat ber-kepentingan dengan berita yang akan diterbitkan. Untuk kesesuaian antara agenda media dan agenda publik juga tidak berjalan secara efektif. Sebab pada tataran konsep kedua agenda tersebut sudah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan cara kerja redaksi pada saat mengadakan rapat perencanaan dan *budgeting*. Tapi dalam tataran realitas, konsep yang telah dibangun tidak sejalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini terjadi karena adanya interfensi dari pihak luar redaksional.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan kepada redaksi Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar sebagai berikut yakni untuk meningkatkan efektivitas kerja redaksi terutama pada agenda media, maka perlu dilakukan langkah kongkrit yang sifatnya preventif agar interfensi dari pihak di luar redaksional tidak lagi memengaruhi agenda media Harian Berita Kota Makassar. Pada agenda publik diperlukan upaya persuasif bagi pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, korlip dan korda dalam menghadapi interfensi dari pihak luar.

Hal ini perlu dilakukan agar agenda publik bisa terlaksana sesuai dengan program kerja harian di redaksi. Untuk kesesuaian agenda media dan agenda publik Harian

Berita Kota Makassar Pemimpin Redaksi perlu meningkatkan efektivitas kinerja redaksi, penataan dan penguatan secara sistematis agar semua program terutama agenda media, agenda publik dan program pemberitaan informasi kriminal bisa berjalan sesuai perencanaan awal. Ini sangat diperlukan demi menjaga kewibawaan redaksi dari berbagai interfensi karena adanya kepentingan-kepentingan yang bisa dengan mudah memveto hasil perencanaan setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyle, Karen. (2005). *Media and Violence: Gendering the Debates*. London: Sage Publication
- Descartes. (2004). *Fungsi Agenda Setting Koran Tempo dan Metro TV Mengenai Isu Politik (Kasus Anggota Sekretariat Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Jakarta Selatan)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- .Krippendorff. (1993). *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta, Citra Niaga Rajawali.
- Riksono, Anwar. (2008). *Ketidakadilan Dalam Informasi Kriminal (Wacana Perbandingan Aktor Berita Kriminal di Headline Berita Surat Kabar Koran Merapi Yogyakarta)*.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, PT Rosdakarya
- Schaefer. (2001). *How To Help Children With Common Problems*, New York. Van Nostrand Reinhold.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

